

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang berfokus pada kunjungan ke kawasan-kawasan alami, seperti pegunungan, hutan, pantai, dan taman nasional, dengan tujuan utama menikmati keindahan alam, keanekaragaman hayati, serta ketenangan lingkungan. Pariwisata ini menekankan pada interaksi yang harmonis antara wisatawan dan lingkungan alam, serta sering kali melibatkan unsur edukasi, konservasi, dan pelestarian lingkungan (Rizal dkk., 2025)

Pertumbuhan pariwisata akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia dan komunitas di sekitar daerah tujuan wisata. Pengembangan pariwisata merupakan proses, atau rangkaian upaya dalam mewujudkan berbagai sumber daya pariwisata, dimana dalam pengembangan pariwisata tersebut harus memperhatikan beberapa aspek, seperti objek, dan daya tarik wisata. Pengembangan kawasan wisata ini dimaksudkan untuk menambah keindahan dari tempat wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada (Mustika dkk., 2021).

Negara yang menyimpan banyak potensi alam yang melimpah baik daratan maupun lautan ialah Indonesia pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya (Erfinda dkk, 2024).

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri (Pariyanti dkk., 2020). Masih cukup banyak ditemukan sumber daya alam dan pesona alam di berbagai daerah di Indonesia yang masih belum dikelola dengan baik, bahkan masih belum diketahui oleh banyak orang (Nurhidayat dkk., 2025).

Pengembangan pariwisata sebagai proses atau serangkaian usaha untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada, dalam sektor pariwisata melakukan pengembangan ini beberapa aspek penting, seperti objek dan daya tarik wisata, harus diperhatikan yaitu dengan tujuan dari pengembangan kawasan wisata untuk meningkatkan keindahan tempat wisata tanpa merusak ekosistem alam yang ada. Pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata di Indonesia didorong untuk menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat perekonomian, mengembangkan destinasi wisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini terlihat dari pertumbuhan industri pariwisata yang terus berkembang seiring waktu, dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai daerah tujuan wisata yang terkenal akan keindahan alam, keunikan destinasi, dan keberagaman budaya yang dimiliki (Nugraha & Virgiawan, 2022).

Pariwisata salah satu sektor industri yang ikut berperan dalam usaha peningkatan pendapatan di Indonesia. Produk dan jasa pariwisata tidak hanya potensi, tetapi terdapat unsur-unsur lain yang juga menjadi satu kesatuan didalam produk wisata yaitu aksesibilitas, amenitas, dan *hospitality* (Rahmadayanti &

Murtadlo, 2020). Pengembangan kawasan wisata merupakan *alternative* yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan. Disamping itu untuk dapat melakukan pengembangan perlu memperhatikan berbagai aspek, suatu objek wisata yang akan dikembangkan harus memperhatikan syarat-syarat pengembangan daerah menjadi objek wisata yang dapat diandalkan (Rahmadiani, 2022)

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu pilar utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi lokal dan global, sektor ini dianggap sebagai industri terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia, dengan pertumbuhan yang sangat pesat serta kemampuan untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Potensi sumber daya pariwisata yang ada, jika dikelola secara profesional dan efektif, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata menjadi penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat dengan pengembangan pariwisata masyarakat dapat membuka peluang usaha yang meningkatkan kesejahteraan (Ginting dkk., 2020).

Pembangunan pariwisata harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup karena menyangkut kebutuhan generasi yang akan datang. Mewariskan alam dan lingkungan hidup yang lestari kepada anak cucu dan generasi yang akan datang adalah kewajiban kita sebagai bangsa yang beradab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf f dan huruf g bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (Izza dkk., 2025).

Pengembangan bidang pariwisata hal penting bagi negara diseluruh dunia mengupayakan untuk memajukan pariwisata di negara yang dimiliki sebab pendapatan dari sektor pariwisata sangat memuaskan dalam artian sangat besar (Gamal, 2023).

Pariwisata dapat berdampak besar di seluruh dunia memiliki pengaruh ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan terhadap destinasi pariwisata dan pengaruhnya bisa positif dan negatif. Secara prinsip, pariwisata merupakan kegiatan individu atau kelompok yang melakukan perjalanan (Masjhoer, 2019). Aksesibilitas menjadi kunci utama terbukanya kawasan terpencil yang tersebar di pinggiran Indonesia, dan potensi wisata bahari di daerah tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa dikarenakan jauh dari pusat pembangunan.

Semangat utama peningkatan perekonomian masyarakat tersebut adalah menguatkan arah dan strategi pengembangan sektor perekonomian unggulan di sektor perdagangan serta sektor pertanian dan pariwisata (Purwoko, 2018).

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat pelaku usaha wisata biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wisata (Tui dkk., 2023).

Wisata alam adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam beserta ekosistemnya, baik dalam keadaan asli maupun setelah adanya intervensi manusia. Objek wisata alam mencakup segala bentuk alam beserta ekosistemnya, yang menarik untuk dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.

Terciptanya kondisi yang kondusif akan muncul efek positif seperti meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa negara serta menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan ini tentunya sangat menguntungkan tidak hanya bagi perkembangan sektor pariwisata, tetapi juga bagi pertumbuhan sektor-sektor lain seperti ekonomi dan pembangunan (Lestari & Suharyanti, 2020).

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dan strategis terletak di bagian timur Pulau Sumatra, provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan resmi berdiri pada 24 September 2002. Luas wilayah sekitar 8.201,72 km², Kepulauan Riau terdiri dari dua kota, yaitu Tanjungpinang dan Batam, serta lima kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Provinsi ini memiliki lebih dari 2.400 pulau besar dan kecil, di mana sekitar 30% di antaranya belum bernama dan berpenduduk.

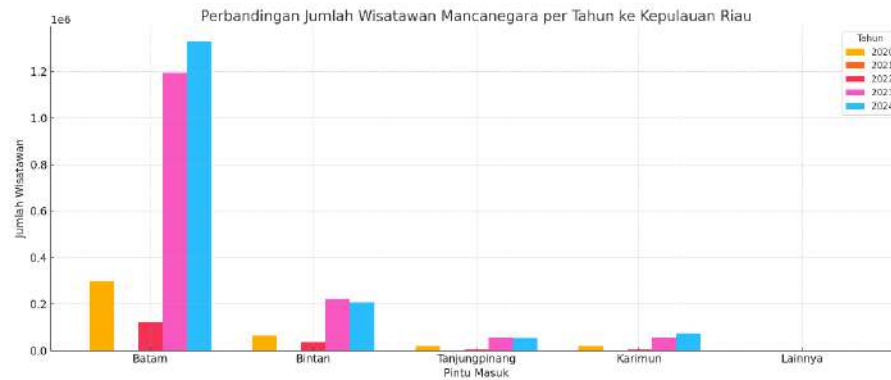
Daerah Kepulauan Riau sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja letaknya yang berada di jalur lalu lintas internasional antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka menjadikan provinsi Kepulauan Riau sebagai titik penting dalam perdagangan dan transportasi laut sekitar 96% dari total luas wilayahnya adalah lautan, menjadikannya kaya akan sumber daya alam terutama di bidang perikanan. Segi demografi, penduduk Kepulauan Riau pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 2.220.043 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 270 jiwa/km².

Tabel 1.1 Persentase Wisatawan Mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau

Pintu Masuk Wisatawan Mancanegara	2020	2021	2022	2023	2024
Batam	299.158	2.651	122.288	1.192.931	1.326.831
Bintan	64.896	283	38.344	222.118	208.605
Tanjungpinang	22.115	154	6.621	57.538	55.472
Karimun	21.836	15	7.300	58.093	75.638535
Lainnya			1	219	535
Total	408.005	3.103	175.554	1.530.899	1.667.801

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (Telah diolah kembali)

Gambar 1.1. Perbandingan Jumlah Wisatawan Mancanegara Kepri



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun wilayah ini tetap menjadi salah satu destinasi utama di Indonesia, terutama karena lokasinya yang strategis dan akses yang mudah dari negara tetangga setelah masa pandemi, sektor pariwisata mulai pulih dan minat wisatawan asing kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Kepulauan Riau mampu mempertahankan daya tariknya sebagai tujuan wisata unggulan.

Sehingga dapat dilakukan pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kepariwisataan di kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Terdapat lokasi objek wisata dan jenis objek wisata yang bisa menjadi destinasi wisata oleh wisatawan mancanegara maupun domestik serta Event Event yang dilakukan untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik di kota Tanjungpinang Hal ini merupakan kesempatan besar bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal, dengan posisi kota Tanjungpinang yang wilayahnya dekat dengan negara Malaysia dan Singapura

peluang besar untuk menarik wisatawan luar datang dan berkunjung ke kota Tanjungpinang Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri disamping bernilai ekonomi yang tinggi pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa (Suryanti dkk., 2022)

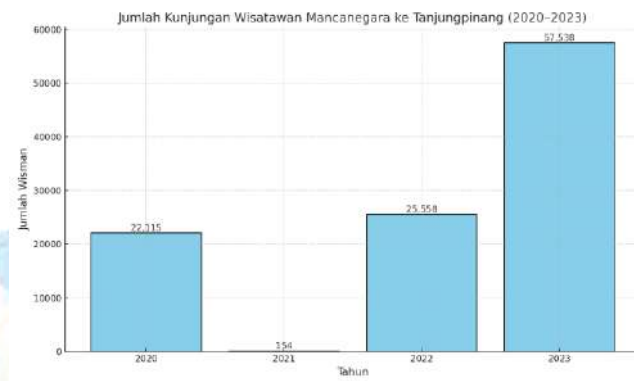
Memiliki potensi pariwisata yang melimpah ditandai dengan keindahan alam, warisan budaya, dan sejarah yang beragam kota ini dikelilingi oleh sejumlah pulau yang menyajikan pemandangan pantai yang menawan, situs-situs bersejarah, serta budaya lokal yang kaya.

Tabel 1.2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan mancanegara yang datang ke kota tanjungpinang

Data Tahunan Wisatawan Mancanegara ke Tanjungpinang	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2020	22.115
2021	154
2022	25.558
2023	57.538

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2025 (Telah diolah kembali)

Gambar 1.2. Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Tanjungpinang



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2025

Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Tanjungpinang menunjukkan tidak tetap selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, sebelum pandemi *Covid-19* berdampak besar, Tanjungpinang masih menerima sekitar 22.115 kunjungan. Namun, pada tahun 2021, jumlah kunjungan turun drastis menjadi hanya 154 orang akibat pembatasan perjalanan internasional. Mulai pulihnya sektor pariwisata global, jumlah kunjungan meningkat menjadi 25.558 orang pada tahun 2022.

Pemulihan berlanjut secara signifikan di tahun 2023, dengan total 57.538 kunjungan, menjadikannya tahun dengan jumlah kunjungan tertinggi dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, dalam empat tahun terakhir (2020–2023), jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Tanjungpinang mencapai 105.365 orang data ini mencerminkan tren pemulihan pariwisata yang positif setelah pandemi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, Koridor Pariwisata Daerah (KPD)

Tanjungpinang difokuskan untuk mengembangkan potensi wisata yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan kreativitas. Memiliki potensi yang besar, namun pengelolaan sektor pariwisata di Tanjungpinang perlunya pengoptimalan sehingga kontribusinya terhadap ekonomi lokal masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi pengembangan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Kota Tanjungpinang memiliki 4 destinasi pariwisata alam meliputi:

1. Pantai Tanjung Setumu
2. Pantai Tanjung Siambang
3. Pulau Basing
4. Pulau Sekatap

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2022–2032, Pasal 22 menjelaskan bahwa strategi pengembangan daya tarik wisata kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kota (DPK) dan mendukung pengembangan wilayah kota. Strategi tersebut meliputi berbagai kegiatan, antara lain:

1. Mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
2. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
3. Mengusulkan, membentuk dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Daerah.

Seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata di Kota Tanjungpinang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan potensi wisata daerah, dengan merumuskan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota. Konteks ini, pemanfaatan keindahan alam serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kota Tanjungpinang menjadi fokus utama, sehingga diharapkan dapat menciptakan pengalaman wisata yang menarik dan berkesan bagi pengunjung.

Terdapat faktor kendala dalam melakukan pengembangan wisata alam yang berada di Pulau Dompak diantaranya terkait permasalahan hibah/serah terima belum sepenuhnya, masalah *overlap* pertanahan dalam pengembangan wisata alam di Pulau Dompak mencerminkan kompleksitas pengelolaan lahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kota meskipun Pulau Dompak ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pulau Dompak yang terletak di Kepulauan Riau, memiliki status kepemilikan lahan yang rumit, sehingga pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat dilakukan secara langsung sebagian tanah di pulau ini merupakan aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang menimbulkan batasan administratif dan hukum dalam pengelolaan lahan oleh pemerintah kota, kondisi *clean and clear* diperlukan untuk menghindari potensi sengketa di masa depan jika ada pihak lain yang mengklaim tanah setelah hibah, ini dapat menimbulkan masalah hukum yang berpotensi memperlambat atau membatalkan rencana pembangunan. Proses ini juga mencegah penyalahgunaan lahan oleh pihak-pihak yang tidak berhak melalui tata kelola pemerintahan, status *clean and clear* memungkinkan Pemerintah Kota

Tanjung Pinang untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut secara sah tanpa hambatan hukum.

Penetapan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, Pasal 7, yang selanjutnya menetapkan Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari sebagai kawasan administratif provinsi Dasar hukum ini diperkuat oleh Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2007 mengenai lokasi perkantoran pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, serta Nota Kesepahaman antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau nomor 01/MoU/I/2007. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kemudian menyusun rencana induk Pusat Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2007, yang direvisi pada tahun 2012.

Melalui penelitian ini peneliti akan mengambil studi kasus pada objek wisata alam yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang yaitu pantai Tanjung Setumu dan pantai Tanjung Siambang kedua pantai ini dipilih karena memiliki potensi alam dengan karakteristik keindahan yang khas namun hingga saat ini pengelolaannya belum berjalan secara optimal terdapat kendala nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengunjung, khususnya terkait aksesibilitas menuju lokasi wisata alam seperti Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang.

Akses jalan menuju kawasan ini belum sepenuhnya memadai masih banyak ruas jalan yang belum beraspal, permukaannya tidak rata, dan didominasi oleh bebatuan lepas kondisi ini menjadi hambatan tersendiri, terutama saat musim hujan. Kurangnya infrastruktur penunjang ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata belum menyentuh aspek dasar kenyamanan akses, yang padahal sangat

berpengaruh terhadap minat kunjungan dan potensi pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk diteliti terutama dalam melihat bagaimana strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan wisata tersebut secara terarah dan berkelanjutan.

Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang merupakan dua destinasi wisata alam yang berada di Pulau Dompok Kota Tanjungpinang dan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi Pantai Tanjung Setumu dikenal dengan suasana yang tenang serta menjadi lokasi pilihan masyarakat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam karena letaknya yang langsung menghadap ke laut terbuka Suasana di pantai ini masih alami dengan kehadiran vegetasi mangrove yang tumbuh di sekitarnya memberikan nilai ekologis dan potensi untuk dikembangkan sebagai wisata edukasi lingkungan.

Keberadaan pantai ini juga sering dimanfaatkan warga untuk kegiatan memancing atau sekadar menikmati ketenangan alam Sedangkan Pantai Tanjung Siambang memiliki daya tarik yang berbeda yaitu lebih ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal untuk rekreasi bersama keluarga.

Pantai ini cenderung lebih terbuka dengan ombak yang tenang dan pasir yang halus sehingga cocok dijadikan tempat bermain anak anak atau lokasi berkumpul komunitas lokal Akses menuju pantai ini juga lebih mudah dilalui sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat dari pusat kota Kedua pantai ini memiliki keunggulan dari segi kedekatannya dengan pusat pemerintahan serta keindahan alam yang masih terjaga sehingga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan berbasis alam dan budaya.

Melalui studi kasus ini peneliti ingin menganalisis lebih dalam sejauh mana upaya pemerintah dalam merancang strategi pengembangan pariwisata alam serta faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pengelolaannya. Selain itu pemilihan studi kasus ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata di lapangan mengenai potensi pariwisata alam yang dimiliki Kota Tanjungpinang serta bentuk intervensi kebijakan yang diperlukan agar kawasan ini dapat dikembangkan secara maksimal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan daerah. Konteks peran pemerintah diperlukan strategi yang tidak hanya terfokus pada promosi destinasi tetapi juga mencakup aspek pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pendekatan ini perlu diperhatikan kembali khususnya dengan cara melakukan pelaporan rutin secara mingguan maupun bulanan guna mengetahui kondisi aktual di lapangan serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi, namun ada yang perlu menjadi perhatian utama antara lain kualitas infrastruktur kebersihan dan keteraturan lingkungan sekitar kawasan wisata serta kesiapan fasilitas umum yang mendukung kenyamanan pengunjung.

Pengawasan yang konsisten dan berbasis data lapangan pemerintah daerah dapat mengambil langkah langkah perbaikan yang lebih terukur dan tepat sasaran. Apalagi mengingat bahwa Pulau Dompak yang berada di wilayah administratif Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya tarik alam yang khas dan aksesibilitas yang cukup baik dari pusat kota sehingga berpotensi menjadi ikon wisata daerah yang strategis dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Keunggulan lain dari Pulau Dompok yaitu lokasinya yang sangat dekat dan mudah dijangkau dari pusat maupun area perkotaan sehingga memberikan nilai tambah baik dari sisi efisiensi waktu maupun kemudahan transportasi. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi wisata dengan biaya pengembangan yang relatif lebih ringan dibandingkan destinasi yang jauh dari pusat kota. Selain itu jarak yang dekat dengan wilayah administratif juga mempermudah proses pengawasan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur oleh pihak terkait sehingga strategi pengembangan wisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peningkatan promosi terhadap potensi wisata alam seperti yang terdapat di Pulau Dompok juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna menarik minat wisatawan, sembari tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Kerangka ilmu pemerintahan, hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan destinasi wisata.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencan Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2032, pada Pasal 22 menjelaskan strategi untuk mengembangkan daya tarik wisata sekaligus mendukung pembangunan kota tujuan dari strategi yang tertera belum sepenuhnya terealisasi dilapangan demikian mengenai hal ini menarik untuk diteliti, karena Tanjungpinang memiliki potensi wisata alam yang besar, terutama di Pulau Dompok yang memiliki pantai-pantai indah seperti Pantai Setumu dan Pantai Tanjung Siambang.

Aspek ruang lingkup pemerintahan daerah dengan pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah. Pemerintah memiliki peranan strategis dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah melalui penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata yang memperhatikan nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah perlu merancang berbagai program untuk memperkuat kapasitas wilayah terutama dalam mengelola potensi wisata yang belum tertata secara optimal seperti yang terdapat di Pulau Dompok Kota Tanjungpinang dengan destinasi seperti Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang.

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga sebagai penghubung yang mendorong kerja sama antar masyarakat guna meningkatkan manfaat ekonomi dan daya tarik wisata daerah. melalui pengelolaan yang sistematis dan melibatkan banyak pihak pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan tanggung jawab dan pelibatan publik. Penguatan dalam bentuk kebijakan dan koordinasi antar sektor menjadi langkah penting agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara optimal berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangannya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan wisata (Pendong dkk., 2020).

Peningkatan jumlah wisatawan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), menciptakan lapangan kerja, serta mendorong investasi di sektor-sektor pendukung seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif (Afriyadi dkk., 2024). Potensi wisata alam yang kaya dan upaya pengembangan yang terencana, Kota Tanjungpinang memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan wisata alam di Kota Tanjungpinang dengan studi kasus pada Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang yang memiliki daya tarik berupa keindahan alam yang khas dan unik. Potensi ini perlu dimaksimalkan melalui strategi yang tepat agar mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan merencanakan pengelolaan kawasan memperbaiki infrastruktur serta melakukan promosi dan pemantauan kondisi lapangan secara berkala. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai pendorong peningkatan ekonomi daerah serta memperkuat identitas Kota Tanjungpinang sebagai destinasi wisata alam yang menarik.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan wisata alam di Kota Tanjungpinang dengan studi kasus pada kawasan wisata Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang di wilayah Pulau Dompak.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam di Kota Tanjungpinang khususnya di wilayah Pulau Dompak yang mencakup Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat digunakan untuk membangun wacana ilmiah yang pada dasarnya mengkaji secara mendalam mengenai strategi pengembangan objek wisata alam pulau dompak kota tanjungpinang.
2. Menjadi sumber referensi atau bahan pustaka bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan mengkaji hal yang relevan dengan penelitian ini.

1.3.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan arah bagi pemerintah daerah, pengelola destinasi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengembangkan objek wisata alam dipulau dompak kota tanjungpinang
2. Penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengembangan wisata alam yang lebih terarah dan efektif khususnya di kawasan Pantai Tanjung Setumu dan Pantai Tanjung Siambang dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan